

## WEEKLY REPORT



## MARKET DRIVERS

DOMESTIK

- **Bank Indonesia (BI) mencatat telah merealisasikan skema berbagi beban (*burden sharing*) dengan pemerintah untuk mendanai APBN 2020 sebesar Rp183,48 triliun (28 September 2020).** Skema *burden sharing* itu dilakukan melalui pembelian SBN secara langsung oleh BI di pasar perdana melalui pembiayaan *public goods* dan *non public goods*. Hal ini sesuai dengan SKB II bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020. Sementara itu, kesepakatan *public goods* yang akan dibiayai oleh BI sebesar Rp397, 56 triliun dan kesepakatan pembiayaan untuk *non public goods* terkait UMKM senilai Rp177,03 triliun. Lebih lanjut, Perry menyampaikan realisasi pembagian beban dengan pemerintah untuk *non public goods* terkait UMKM telah mencapai Rp 44,38 triliun dan pemerintah akan menanggung beban bunga berasal dari selisih yield SBN sekitar 2,7%, atau 2,8%. Jika pembelian BI di pasar perdana untuk pembiayaan APBN berdasarkan SKB I antara Menkeu dan Gubernur BI tanggal 16 April 2020 melalui mekanisme pasar tercatat Rp51,17 triliun. Rinciannya melalui lelang Rp35,73 triliun, *green shoe option* sebesar Rp11,77 triliun, dan *private placement* Rp3,68 triliun. Dengan demikian, total peran BI dalam membeli SBN jangka panjang di pasar perdana mencapai Rp234,65 triliun, baik melalui SKB I dan SKB II. Secara keseluruhan, Perry mengatakan, posisi kepemilikan SBN oleh BI per 25 September 2020 sebesar Rp640,60 triliun. Jumlah ini termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar yang berjumlah Rp166,2 triliun.
- **Gubernur Bank Indonesia melaporkan telah melakukan *quantitative easing* (QE) dengan menginjeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan pada 2020 secara *year to date* mencapai Rp662,1 triliun (28 September 2020).** Injeksi likuiditas tersebut dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020 melalui pembelian SBN dari pasar sekunder dengan penyediaan likuiditas di perbankan melalui mekanisme *term repurchase agreement (repo)* serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). QE pada Januari-April 2020 yang digelontorkan BI sebesar Rp419,9 triliun. QE di antaranya untuk pembelian SBN dari pasar sekunder Rp166,2 triliun, term Repo perbankan Rp160 triliun, FX Swap Rp40,8 triliun, dan penurunan GWM Rupiah Rp53 triliun. Sementara itu, QE Mei-2020, anggaran yang diguyurkan oleh BI sebanyak Rp242,2 triliun. QE terdiri atas untuk penurunan GWM Rupiah sekitar Rp102 triliun, tidak mewajibkan tambahan Giro bagi yang tidak memenuhi RIM mencapai Rp15, 8 triliun, dan term Repo perbankan serta FX Swap Rp124,2 triliun.
- **Bank Dunia atau *World Bank* memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 akan berada pada kisaran -2,0% s.d. -1,6% yoy yang merupakan pertumbuhan negatif pertama kali dalam dua dekade terakhir (29 September 2020).** Hal ini dilaporkan Bank Dunia dalam publikasi *East Asia and Pacific Economic Update, October 2020* yang bertema “*From Containment to Recovery*” yang menggambarkan kondisi perekonomian terkini negara-negara di kawasan Asia bagian Timur dan Pasifik, termasuk outlook kinerja ekonomi Indonesia. Dalam laporan ini, Bank Dunia sekaligus merevisi perkiraan sebelumnya pada Bulan Juni 2020 sebesar 0,0%. Namun demikian, rentang ini masih dalam perkiraan pemerintah yaitu antara -1,7% dan -0,6%. Di samping World Bank, beberapa institusi internasional lainnya juga telah menyampaikan outlook perekonomian Indonesia 2020 terkini, yakni Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan perkiraan sebesar -1,0%, dan OECD sebesar -3,3%. Bank Dunia menilai berbagai faktor akibat eskalasi pandemi COVID-19, seperti

## Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), TbkMenara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

## Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

pembatasan mobilitas, peningkatan risiko kesehatan, dan pelemahan ekonomi global telah memberikan tekanan terhadap permintaan domestik, baik aktivitas konsumsi maupun investasi.



- **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Dewan Komisiner (RDK) telah menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum (29 September 2020).** LPS juga menurunkan 25 bps bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank perkreditan rakyat (BPR). Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya mengatakan, dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan rupiah bank umum menjadi 5,00%, simpanan valas menjadi 1,25%, serta simpanan rupiah di BPR menjadi 7,50%. Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 29 Januari 2021. "Kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan simpanan tersebut diambil didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain arah suku bunga simpanan perbankan yang masih menunjukkan tren penurunan. Lalu kondisi dan prospek likuiditas yang relatif stabil serta perkembangan terkini dari kondisi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian," ungkap Purbaya, Selasa (29/9/2020). Berdasarkan data LPS, suku bunga simpanan industri perbankan masing-masing terpantau turun 47 bps dan 8 bps untuk rupiah dan valuta asing sepanjang periode observasi September 2020 dibandingkan periode observasi bulan sebelumnya. Penurunan tersebut ditopang oleh kondisi likuiditas yang cukup memadai.
- **Pemerintah menambah penempatan uang negara di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dari Rp30 triliun menjadi Rp47,5 triliun atau senilai Rp17,5 triliun (29 September 2020).** Selain itu, periode penempatan dana ini juga diperpanjang. Dalam penempatan uang negara tahap I di Bank BUMN yang senilai Rp30 triliun, dilakukan selama tiga bulan atau berakhir pada September 2020. Pada penempatan uang negara tahap II di Himbara, jangka waktunya adalah selama 110 hari atau 3 bulan lebih 20 hari. Jangka waktu tersebut menyesuaikan dengan kondisi akhir 2020 dan adanya cuti bersama. Dengan jangka waktu tersebut, penempatan uang negara tahap II tersebut akan jatuh tempo pada 13 Januari 2021. Secara terperinci, Bank Mandiri, BRI & BTN mendapatkan dana masing-masing sebesar Rp5 triliun. Sementara untuk BNI titipan dana pemerintah sebesar Rp 2,5 triliun. Ini merupakan kali kedua pemerintah menitipkan dananya ke bank Himbara. Pada tahap pertama, bunga penempatan uang negara yang ditempatkan pemerintah adalah sebesar 3,42% dengan target penyaluran kredit senilai Rp120 triliun. Pemerintah pun mematok bunga penempatan uang negara di Himbara pada tahap dua adalah sebesar 2,84%. Penempatan dana PEN dengan bunga rendah diharapkan dapat mendorong pemberian kredit dengan biaya rendah pula.
- **Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 resmi disahkan menjadi UU APBN 2021, melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI (29 September 2020).** Prospek perekonomian nasional tahun 2021 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Berikut kesepakatannya asumsi makro ekonomi dalam APBN 2021: Pertumbuhan ekonomi pada 2021 adalah 5,0%. Sementara itu, tingkat inflasi adalah 3%. Nilai tukar rupiah disepakati Rp14.600 per dolar AS. Tingkat bunga SBN 10 tahun berada di tingkat 7,29%, kemudian untuk harga minyak mentah Indonesia ditetapkan US\$45 per barel, sedangkan lifting minyak bumi 705 ribu per barel per hari dan lifting gas bumi disepakati 1.007 ribu per barel.
- Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi

## Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

## Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 7,7-9,1%; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7%; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,377-0,379; (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 72,78-72,95; dan (5) melalui kebijakan fiskal 2021 juga diharapkan dapat mencapai indikator pembangunan tahun 2021 dengan target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai kisaran 102-104. **(29 September 2020)**

- Target pendapatan negara pada APBN 2021 mencapai Rp1.743,6 triliun yang terdiri atas Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.444,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp298,2 triliun, yang didukung oleh prospek meningkatnya harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi serta optimalisasi penerimaan dari pelayanan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat serta Penerimaan Hibah diperkirakan mencapai Rp0,9 triliun antara lain ditujukan untuk program-program pengembangan desa dan perkotaan termasuk penyediaan air bersih dan penanganan perubahan iklim. Untuk sisi pengeluaran, yakni Belanja Negara sebesar Rp2.750 triliun. Anggaran belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp795,5 triliun. Dengan demikian, defisit APBN tahun anggaran 2021 disepakati 5,70% terhadap PDB atau Rp1.006,38 triliun dan pembiayaan utang Rp 1.177,35 triliun. **(29 September 2020)**
- **Kementerian Keuangan melaporkan realisasi stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 28 September 2020 mencapai 43,8% atau setara Rp304,82 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun (29 September 2020).** Realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp21,99 triliun atau setara dengan 25,1% dari total anggaran sebesar Rp87,55 Triliun. Sedangkan realisasi serapan terbesar yaitu di sektor perlindungan sosial yang sudah tersalurkan sebesar 74,0% atau setara Rp150,86 triliun dari total anggaran Rp203,91 triliun. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi anggaran stimulus PEN dapat dilihat pada tabel 2.
- **Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (PLJP) dan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS) yang berlaku efektif sejak 29 September 2020 (30 September 2020).** Penyempurnaan ketentuan mengenai PLJP/PLJPS ini dilakukan sebagai upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat fungsi *lender of the last resort* dengan mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Pokok-pokok penyempurnaan ketentuan ini antara lain meliputi:
  1. Penyesuaian suku bunga PLJP menjadi *Lending Facility (LF)* + 100bps sesuai dengan *best practice*, sementara itu Nisbah Bagi Hasil PLJPS tetap sebesar 80%.
  2. Perluasan/penambahan agunan PLJP/PLJPS.
    - ❖ Aset kredit/pembiayaan tidak lagi harus sepenuhnya dijamin oleh tanah dan bangunan dan/atau tanah.
    - ❖ Aset Kredit/pembiayaan kepada pegawai.
    - ❖ Aset kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka stimulus COVID-19.
    - ❖ Agunan lain milik Bank dan/atau pihak lainnya.
  3. Percepatan proses permohonan PLJP/PLJPS dengan mengharuskan bank melakukan penilaian dan verifikasi terhadap agunan yang akan digunakan dalam permohonan PLJP/PLJPS.

## Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

## Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

- **Pada September 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,85. Dari 90 kota IHK, 56 kota mengalami deflasi dan 34 kota mengalami inflasi (1 Oktober 2020).** Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01%; kelompok transportasi sebesar 0,33%; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15%; kelompok kesehatan sebesar 0,16%; kelompok pendidikan sebesar 0,62%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25%. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2020 sebesar 0,89% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) sebesar 1,42%. Komponen inti pada September 2020 mengalami inflasi sebesar 0,13%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–September) 2020 sebesar 1,46% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) sebesar 1,86%.
- **Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia turun dari 50,8 di Agustus menjadi 47,2 di September 2020 (1 Oktober 2020).** Hal ini menunjukkan aktivitas manufaktur yang melemah di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi COVID-19. PSBB juga menghambat kemampuan penyedia bahan baku (*supplier*) untuk memasok input secara tepat waktu. IHS Markit yang mengeluarkan data PMI ini menjelaskan bahwa harapan mengenai output tahun 2021 sangat tinggi, tetapi optimisme tersebut akan sangat bergantung pada pengendalian pandemi. Lebih lanjut, penurunan terjadi di sisi permintaan baru (*new order*) meskipun penurunannya lebih lambat dibandingkan kontraksi yang dalam pada Maret dan Juni saat puncak pandemi. Penurunan penjualan berkontribusi pada kenaikan kapasitas berlebih (*spare capacity*) yang tercermin juga pada penurunan pekerjaan yang harus diselesaikan (*backlogs of works*) yang menghambat perekrutan tenaga kerja lebih lanjut. Perusahaan juga mengurangi aktivitas pembelian dan stok guna melakukan efisiensi. Tekanan di biaya input didorong oleh depresiasi nilai tukar dan diikuti oleh rendahnya harga penjualan. Tercatat sejumlah perusahaan memberikan diskon untuk merangsang penjualan.
- **Hingga awal Oktober 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp9,6 triliun (2 Oktober 2020).** Dana FLPP tersebut digunakan untuk membiayai 94.006 unit rumah atau mencapai 91,71% dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp11 triliun atau 102.500 unit. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010-2020 mencapai Rp53,96 triliun atau sebanyak 749.608 unit rumah.

#### MARKET IMPACTS

- **Dari Indikator Pasar keuangan Indonesia di Tabel 4, dapat kita lihat bahwa terjadi pelemahan kondisi dalam satu minggu terakhir:**
  - **IHSG melemah sebesar 0,39% dalam seminggu terakhir**, yaitu dari 4.946 ke 4.927. Sehingga jika dibandingkan akhir tahun 2019 penurunannya lebih tinggi yaitu menjadi -21,79% ytd. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III

#### Winang Budoyo

Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

#### Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

yang dipastikan memasuki jurang resesi sangat mempengaruhi kinerja pasar saham minggu ini.

- Dalam satu minggu terakhir, **Rupiah terapresiasi sebesar 0,05%**, yaitu dari Rp14.873 per USD menjadi Rp14.865 per USD. Namun jika dibandingkan dengan akhir 2019 juga masih terdepresiasi, yaitu sebesar -7,20% ytd. Apresiasi rupiah selama satu minggu ini disebabkan antara lain investor asing yang mencatat net outflow Rp173,83 triliun, serta premi CDS Indonesia 5 tahun menurun ke level 111,33 setelah minggu sebelumnya berada di level 119,17.
- **Yield SBN Rupiah 10 tahun posisinya bertahan dalam satu minggu terakhir pada level 6,89%**. Posisi ini masih 15bps lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2019 yang sebesar 7,04%. Sementara yield SBN USD 10 tahun turun 10bps menjadi 2,21% dalam seminggu terakhir, dan jika dibandingkan akhir tahun 2019 posisinya jauh lebih rendah, yaitu sudah turun 68bps.

Tabel 1. Postur APBN 2021 (Rp Triliun)

Uraian	APBN 2020 Perpres 72/2020	APBN 2021
<b>A Pendapatan Negara</b>	<b>1 699.9</b>	<b>1 743.6</b>
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	1 404.5	1 444.5
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	294.1	298.2
<b>III. Penerimaan Hibah</b>	1.3	0.9
<b>B Belanja Negara</b>	<b>2 739.2</b>	<b>2 750.0</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	1 975.2	1 954.5
1. Belanja K/L	836.4	1 032.0
2. Belanja Non K/L	1 138.9	922.6
<b>II. Transfer ke daerah dan Dana Desa</b>	763.9	795.5
1. Transfer Ke Daerah	692.7	723.5
2. Dana Desa	71.2	72.0
<b>C Keseimbangan Primer</b>	<b>(700.4)</b>	<b>(633.1)</b>
<b>D Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)</b>	<b>(1 039.2)</b>	<b>(1 006.4)</b>
% Surplus / (Defisit) Anggaran terhadap PDB	<b>(6.34)</b>	<b>(5.70)</b>
<b>E Pembiayaan Anggaran</b>	<b>1 039.2</b>	<b>1 006.4</b>

Sumber : Kemenkeu

Tabel 2. Realisasi Dana PEN s.d 28 September 2020

Sektor	Jumlah Stimulus (Rp T)	Realisasi (Rp T)	Realisasi (%)
Kesehatan	87.55	21.99	25.1%
Perlindungan Sosial	203.90	150.86	74.0%
Insentif Usaha	120.61	27.61	22.9%
UMKM	123.46	79.06	64.0%
Pembiayaan Korporasi	53.57	0.00	0.0%
Sektoral & Pemda	106.11	25.30	23.8%
<b>Total</b>	<b>695.20</b>	<b>304.82</b>	<b>43.8%</b>

Sumber : Kemenkeu

**Tabel 3. Perubahan Beberapa Indikator Pasar**

Perubahan Year-to-Date 2 Oktober 2020								
Nilai Tukar		Saham		Obligasi Pemerintah 10Y			Komoditi	
				Negara	Yield	Yield Change		
EUR	4,47%	CCMP	26,23%	USA	0,67%	-125	Gold	25,6%
PHP	4,29%	SHCOMP	5,51%	Italy	0,79%	-62	Rice	22,0%
JPY	3,14%	SPX	4,64%	India	6,00%	-56	Nickel	2,3%
CNY	2,47%	MXAPJ	1,24%	Germany	-0,54%	-36	Aluminium	-3,9%
MYR	-1,72%	NKY	-2,65%	Thailand	1,31%	-16	CPO	-6,4%
DXY	-2,72%	FBMKLCI	-5,62%	Russia	6,21%	-15	Rubber	-6,6%
THB	-6,43%	SENSEX	-6,20%	Indonesia	6,89%	-15	Coal	-14,0%
IDR	-7,20%	IBOV	-17,44%	China	3,13%	0	Natural Gas	-25,7%
RUB	-26,69%	SET	-21,49%	Japan	0,02%	4	WTI	-38,5%
BRL	-40,33%	JCI	-21,79%	Brazil	7,72%	93	Brent	-39,9%

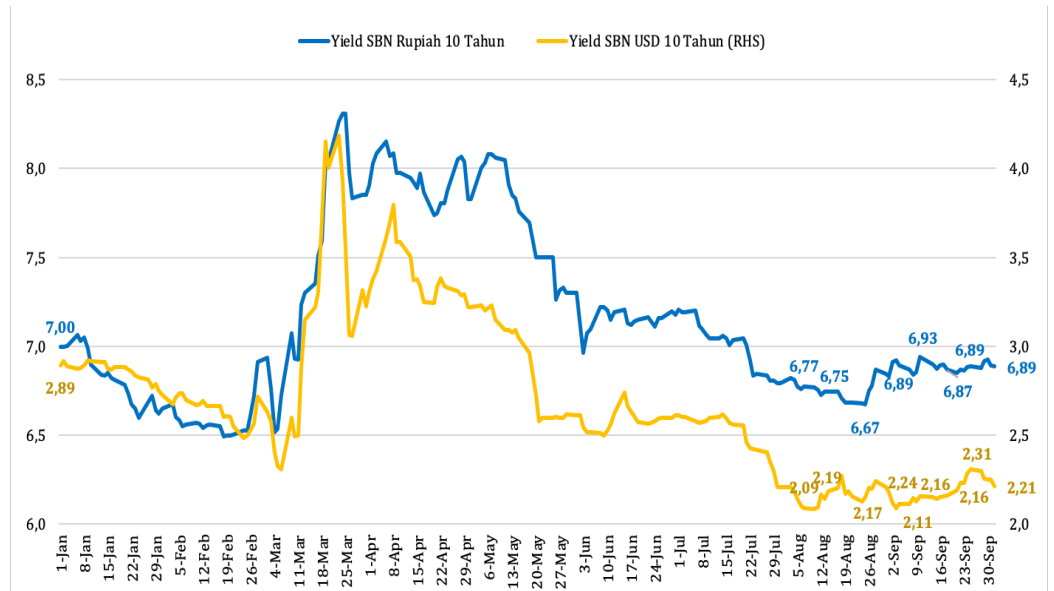
Sumber : Bloomberg

**Tabel 4. Indikator Pasar Keuangan Indonesia Melemah Dalam Seminggu Terakhir**

	02-Oct-20	30-Sep-20	25-Sep-20	Dec-19	25 Sep-2 Oct (wow)	Sep-2 Oct (mtd)	Dec19-2 Oct (ytd)
IHSG	4.927	4.870	4.946	6.300	-0,39%	1,16%	-21,79%
Rupiah	14.865	14.880	14.873	13.866	0,05%	0,10%	-7,20%
10Y Rupiah bond yield	6,89	6,93	6,89	7,04	0 bps	-4 bps	-15 bps
10Y USD bond yield	2,21	2,25	2,31	2,89	-10 bps	-4 bps	-68 bps
CDS Indo 5Y	111,33	114,82	119,17	62,24	-8bps	-3 bps	49 bps

Sumber : Bloomberg

**Grafik 1. Perkembangan Yield SBN Rupiah dan Valas 10 Tahun (%)**



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**

Chief Economist

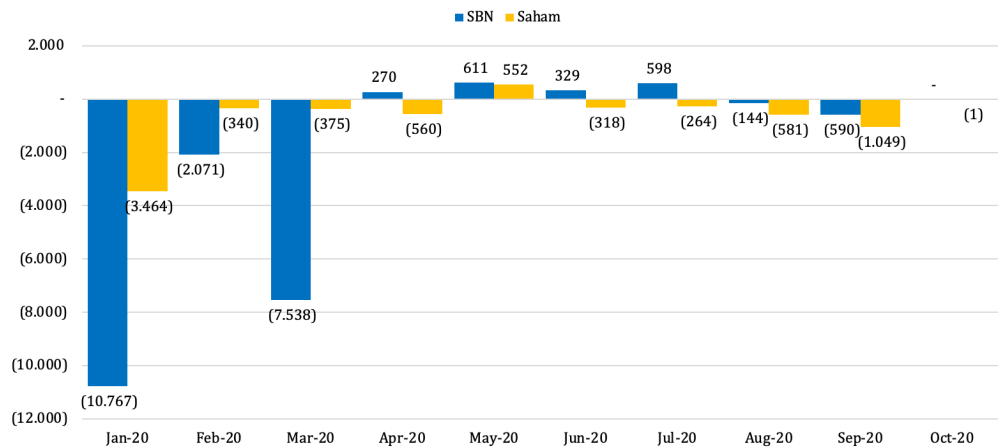
Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

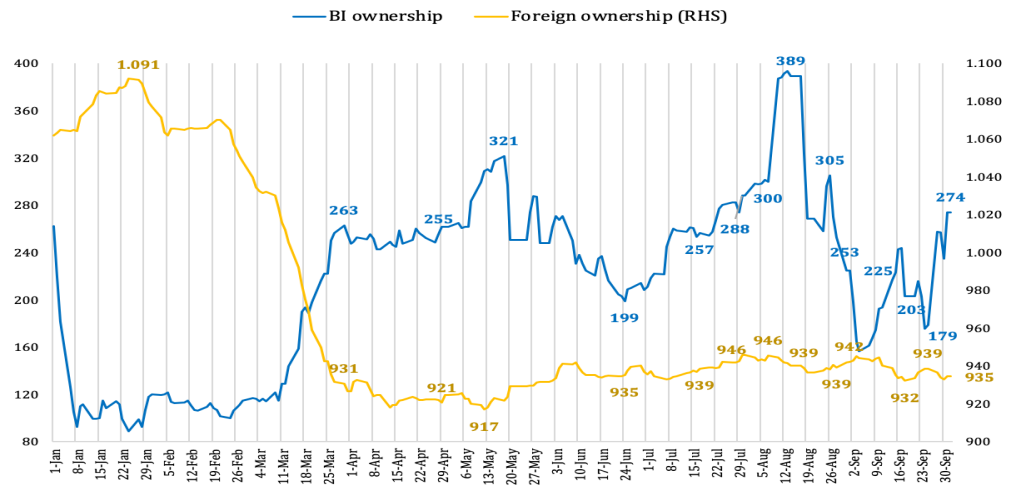
Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

**Grafik 2. Net Buy/Sell Investor Asing di SBN dan Saham (USD juta) s.d 02 Oktober 2020**



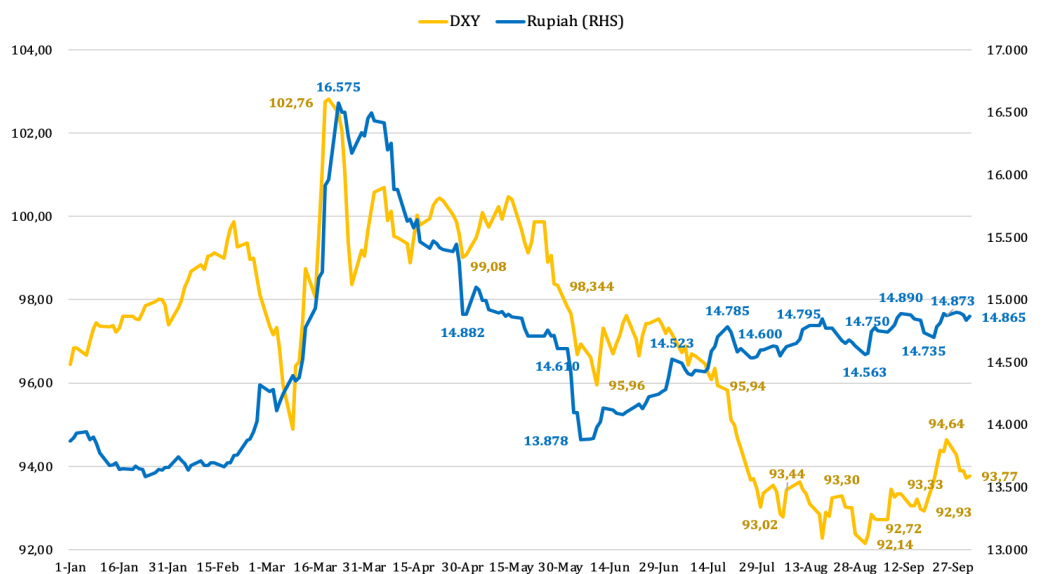
Sumber : Bloomberg

**Grafik 3. Kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan Investor Asing**



Sumber : Bloomberg

**Grafik 4. Rupiah sedikit menguat di tengah pelemahan DXY**



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.